



Media: Republika

Hari: Rabu

Tanggal: 05 Juli 2017

Halaman: 11

Yogyakarta Pastikan tak Ada Intoleransi di Sekolah

SMP Negeri 5 bantah beda-bedakan murid berdasarkan agama.

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota Yogyakarta memastikan tidak ada tindakan intoleransi yang berkembang di sekolah negeri di kota tersebut dan menjamin bahwa proses belajar-mengajar dilakukan pada koridor kebangsaan dan kebhinekaan.

"Kami sangat terkejut dengan isu intoleransi yang berkembang di sekolah negeri di Kota Yogyakarta. Kami yakin bahwa hal seperti itu tidak ada," kata Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, Selasa (4/7).

Menurut Haryadi, siswa di seluruh sekolah di Kota Yogyakarta diajarkan untuk selalu mengembangkan sikap dan gaya hidup yang mengedepankan toleransi dengan tidak membatasi pertemanan hanya pada kelompok tertentu saja.

saling menghormati dan menghargai meskipun berbeda keyakinan.

"Setiap pagi, siswa diberikan waktu 15 menit untuk penguatan ibadah sesuai agama masing-masing. Hal itu pun dilakukan di ruangan sendiri-sendiri secara terpisah," katanya.

Ia menegaskan, SMP 5 berpegang teguh pada ideologi Pancasila dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sekolah. Dalam pendidikan karakter, kata dia, siswa memang diminta untuk menjalankan perintah agama yang dianutnya, sesuai dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sikap saling menghormati sesama penganut agama berlangsung baik di kalangan siswa yang berbeda agama. Demikian juga dengan orang tua siswa. "Di kelas yang siswanya terdapat perbedaan keyakinan agama, justru menunjukkan kekompakan dalam kegiatan belajar. Demikian pula para orang tua saling bekerja sama dan bersilaturahmi idemi

Ia pun meminta orang tua, wali murid atau siswa yang mengalami atau mengetahui tindakan intoleransi agar langsung melapor ke kepala daerah atau ke instansi yang memiliki kewenangan atas satuan pendidikan.

Sebelumnya, isu mengenai tindakan intoleransi dialami oleh SMP Negeri 5 Yogyakarta. Di salah satu media, SMP negeri favorit di Kota Yogyakarta tersebut dinyatakan mewajibkan seluruh siswi Muslim mengenakan hijab.

Namun, pernyataan tersebut langsung dibantah oleh Kepala SMP Negeri 5 Yogyakarta Suharno yang menyatakan tidak ada aturan atau kewajiban tersebut. "Di dalam tata tertib sekolah memberikan kesempatan siswi Muslim untuk berhijab, tetapi tidak disebutkan adanya kewajiban bagi mereka untuk berhijab," katanya.

Menurut dia, sekolah tidak pernah membeda-bedakan murid berdasarkan agama yang mereka anut tetapi tetap mengembangkan sikap

kemajuan bersama anaknya dalam akademik dan pendidikan karakter," katanya.

Ia menegaskan selama kepemimpinannya sebagai kepala sekolah, tidak pernah terjadi praktik perundungan (*bullying*) atau intimidasi terhadap siswa yang berbeda keyakinan.

Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Yogyakarta Rudy Prakanto mengatakan, isu mengenai tindakan intoleransi juga sempat mendera sekolah yang dipimpinnya. "Isu intoleransi ini sering muncul setiap memasuki masa penerimaan siswa baru," kata Rudy.

Sejumlah isu itu di antaranya pemisahan ruang kelas untuk siswa laki-laki dan perempuan, atau ada kain pemisah tempat duduk antara siswa laki-laki dan perempuan jika kelas mereka digabung. "Tidak ada hal-hal seperti itu. Semua siswa mendapatkan perlakuan sama, termasuk untuk kegiatan keagamaan mereka," katanya. ■ antara ed: ferman rahadi

Tindak Lanjut

Untuk Ditanggapi

Untuk Diketahui

Jumpa Pers

1.

2.

3.

4.

5.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Kantor Kesatuan Bangsa			

Yogyakarta, 05 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005